

KATA PENGANTAR

Saat ini penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sudah merupakan hal yang wajib dilaksanakan dalam setiap kegiatan usaha apalagi dalam persaingan bisnis perbankan saat ini yang mengharuskan adanya kemudahan akses oleh masyarakat umum terhadap kegiatan usahanya.

Bank Sulut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam bisnis perbankan nasional merasakan dampak positif atas digalakkannya kegiatan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* ini oleh pemerintah karena dengan sendirinya dari waktu ke waktu terasa adanya perubahan ke arah yang lebih baik tidak hanya dari sisi pendapatan yang terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun namun lebih dari itu di mata masyarakat Bank Sulut telah dilihat sebagai aset berharga dan kebanggaan pemerintah dan masyarakat Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Gorontalo.

Untuk itu kesadaran yang terus tumbuh dan berkembang dari seluruh tingkatan dan jenjang yang ada mulai dari pengurus serta karyawan Bank Sulut terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* ini harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan dari waktu ke waktu, dan sekiranya dengan kembali di-*release*-nya laporan tahunan ini dapat semakin mengkokohkan eksistensi Bank Sulut sebagai lembaga perbankan yang terpercaya, yang semakin tampil lebih baik serta yang peduli pada perkembangan bisnis dan perkembangan masyarakat khususnya di Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Gorontalo serta nasional dan bahkan internasional pada umumnya.

**PT. BANK SULUT
DIREKSI**

JEFFRY J. WURANGIAN
Direktur Utama

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I PENDAHULUAN	1
II. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI PENUNJANG PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE	2
III. SELF ASSESSMENT PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE	3
IV PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SELAMA TAHUN 2009	4
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	4
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	7
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite Di Bawah Komisaris	11
4. Penanganan Benturan Kepentingan	16
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern	16
6. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar	18
7. Rencana Stratejik Bank	18
8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya	19
V KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BANK SULUT	21
VI PENUTUP	23
Lampiran:	
- Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit	

I. PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan terjadinya peningkatan eksposur risiko bank, sehingga di perlukan suatu tatanan yang baik untuk mengelola perusahaan atau industri perbankan.

Tatanan tersebut di kenal dengan nama *Good Corporate Governance* (GCG), yang pelaksanaannya dalam rangka peningkatan kinerja Bank, melindungi stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan.

Good Corporate Governance pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan masa-masa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yang di hadapi oleh industri perbankan semakin meningkat.

Dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* ini senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yakni :

- 1). Transparansi (*transparancy*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
- 2). Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolannya berjalan secara efektif.
- 3). Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengolahan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengolahan bank yang sehat.
- 4). Independensi (*indenpedency*), yaitu pengolahan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
- 5). Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Guna mendukung penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di atas, Bank Sulut berupaya mengimplementasikan pelaksanaannya secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam setiap aktifitas usaha operasional oleh seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yakni seluruh pengurus dan karyawan Bank mulai dari Dewan Komisaris, Direksi dan sampai pada pegawai tingkatan paling bawah.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 yang disempurnakan dengan PBI No.8/14/PBI/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, bank diwajibkan untuk menyajikan informasi kepada stakeholders tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan kesimpulan umum hasil self assesment pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank Sulut maka disusunlah laporan ini.

II. PENERAPAN MANEJEMEN RISIKO SEBAGAI PENUNJANG PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Penerapan Manajemen risiko di Bank Sulut mengacu pada Peraturan Bank Indonesia dan ketentuan intern Bank antara lain Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Manajemen Risiko dan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Profil Risiko. Untuk memastikan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuannya, Bank Sulut telah membentuk organisasi manajemen risiko serta menetapkan tugas dan tanggung jawab atas setiap jenis risiko dan setiap tahapan proses manajemen risiko.

Komite Manajemen Risiko (KMK/Komenko) sebagai suatu badan tertinggi dalam sistem manajemen risiko bank yang beranggotaan Direksi dan seluruh Pemimpin Divisi.

Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan (MRK) bersama-sama dengan *Risk Taking Unit*, bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko secara terpadu, yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan.

Proses Manajemen Risiko

Berkenaan dengan upaya membangun kesadaran dan budaya manajemen risiko (*risk culture*) terhadap seluruh jenis risiko, Bank Sulut secara berkesinambungan mengembangkan penerapan *Risk Self Assessment* (RSA) yang mewajibkan setiap unit kerja melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap aktivitas operasionalnya. Pengembangan tersebut sebagai upaya mengimbangi perkembangan ketentuan dan kompleksitas usaha bank. Saat ini sedang dimulai langkah penerapan pengukuran kinerja pegawai dan unit kerja secara periodik dengan memperhitungkan faktor-faktor risiko dalam aktivitas pencapaian target kerjanya.

Manajemen Risiko Kredit

Proses indentifikasi, penilaian, pengendalian dan pemantauan terhadap risiko kredit telah dilakukan. Namun dalam perkembangannya, disadari perlunya pembenahan dan perbaikan terhadap metode pengukuran risiko kredit melalui *Credit Rating*.

Pendekatan pengukuran risiko melalui rating yang dimaksud, sejauh ini diakui sebagai Pendekatan pengukuran risiko kredit yang lebih akurat serta sensitivitas risiko (*risk sensitive*) sebagai hal yang sangat penting dalam memperhitungkan cadangan kerugian, modal (*capital risk*), *pricing*, alokasi modal serta manajemen portofolio.

Beberapa tujuan manajemen risiko kredit adalah:

- Pengendalian risiko kredit dengan cara melakukan pembatasan eksposur dan tindakan perbaikan sehingga kerugian yang mungkin terjadi dapat diminimalkan.
- Penerapan *four eyes principles* pada proses pemberian kredit, yaitu pemisahan antara *Relationship Management* (RM) selaku petugas operasional dan *Credit Risk Management* (CRM) selaku pengendali risiko kredit.

- Penerapan *Early Warning System (EWS)* sebagai salah satu alat pemantauan (Monitoring kredit) dengan cara mendeteksi secara dini debitur yang berpotensi *default*.

Manajemen Risiko Pasar

Risiko Pasar diukur berdasar dua komponen, yaitu risiko tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar. Strategi Bank dalam membangun dan mengembangkan manajemen risiko pasar, antara lain dengan mengembangkan *Asset Liabilities Committee (ALCO)*.

Tugas utamanya, antara lain mengembangkan/mengkaji ulang strategi *Asset and Liabilities Management (ALMA)* dalam upaya dampak buruk akibat pergerakan negatif dari suku bunga dan nilai tukar, mengevaluasi kebijakan *pricing* baik *asset* maupun *liabilities*, memberikan rekomendasi portofolio penyediaan dana dikaitkan dengan manajemen likuiditas dan peningkatan pendapatan Bank, serta menginformasikan kepada manajemen setiap perkembangan ketentuan/peraturan yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.

Manajemen Risiko Operasional

Pengelolaan risiko operasional terus melakukan penyempurnaan secara berkesinambungan dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Untuk memenuhi kebutuhan ini harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan sistem yang mendukungnya. Sesuai dengan rencana yang telah dibuat, pengembangan manajemen risiko operasional di Bank Sulut saat ini sedang dalam tahapan *review* BPP dan SOP untuk penyesuaian dengan pemberlakuan PBI 11/25/2009.

Manajemen Risiko Lainnya.

Bank telah menyusun kerangka kerja manajemen risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, risiko likuiditas.

Dengan tetap mengacu pada Pedoman Kebijakan Pengelolaan Risiko Bank Sulut tersebut, telah dimulai berbagai tindakan nyata dalam tindakan nyata dalam rangka pengembangan manajemen jenis-jenis risiko dimaksud, antara lain dengan penetapan akuntabilitas pengelolaan jenis risiko melalui konsolidasi organisasi manajemen risiko dan penyusunan rencana bisnis (*business plan*) yang melibatkan setiap unit kerja yang mempunyai aktivitas fungsional Bank sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Bank Indonesia. Dengan rencana kerja yang jelas, Bank mempunyai arahan dan prioritas kerja dalam menentukan proses manajemen risiko.

Bank memiliki kerangka kerja proses manajemen risiko terpadu dengan tujuan untuk melindungi modal bank dan optimalkan hubungan risiko dan return.

Konsolidasi atas hasil identifikasi dan pengukuran risiko dilanjutkan dengan tahap pemantauan dan pengendalian secara terpadu. Tahap pengintegrasian dilakukan dengan analisa terhadap hasil pengukuran modal berisiko dan probabilitas bisnis.

Modal berisiko dihasilkan melalui simulasi yang meliputi kondisi bisnis normal hingga kondisi stres. Hasil analisis terhadap kondisi permodalan dan profitabilitas bisnis merupakan input

dalam pengelolaan modal, penyusunan dan perekomendasi kebijakan, prosedur risiko terpadu serta perencanaan strategi bisnis.

III. SELF ASSESSMENT PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Sesuai Ketentuan bank BI No.8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 Tanggal dan Surat Edaran BI No.9/12/DPNP perihal pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, diwajibkan untuk melakukan *Self Assessment* penerapan *Good Corporate Governance* pada masing-masing Bank.

Self Assessment dilakukan terhadap 11 aspek yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
4. Penanganan Benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan
6. Penerapan fungsi audit intern
7. Penerapan fungsi audit ekstern
8. Fungsi manajemen risiko termasuk pengendalian intern
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan intern
11. Rencana strategis Bank.

Pemeringkatan aspek-aspek tersebut di atas didasarkan pada kinerja penerapan GCG terhadap kriteria minimum yang ditetapkan oleh BI.

IV. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SELAMA TAHUN 2009

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS.

Jumlah Dewan Komisaris

Berdasar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Februari 2008, Dewan Komisaris Berjumlah 4 (empat) orang dengan susunan sebagai berikut:

Nama	jabatan	Domosili	Mulai	Berakhir
Drs. Robby Mamujaja	Komisaris Utama	Manado	28/02/2008	27/02/2012
Arsjad Daud, SH	Komisaris	Manado	28/02/2008	27/02/2012
Drs. John Rumondor	Komisari	Manado	28/02/2008	27/02/2012
Jantje Monalu, SE.	Komisaris	Manado	04/11/2008	03/11/2012

Susunan Dewan Komisaris tersebut telah dicatat dalam administrasi Bank Indonesia melalui Surat Bank Indonesia Nomor 10/3/DPIP/Prz/Rahasia tanggal 04 Desember 2008

Komposisi Dewan Komisaris tersebut diatas telah memenuhi ketentuan :

- Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
- Seluruh Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya dan atau Direksi tidak terdapat hubungan kekerabatan sehingga dijamin independensinya.
- Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah lulus *Fit & Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris :

- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi secara langsung maupun melalui surat, namun tidak terlibat dalam pengambilan kegiatan operasional Bank kecuali dalam hal penyediaan dana dan penerimaan dana kepada dan dari pihak terkait.
- Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan atau / hasil pengawasan otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank
- Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara Independen
- Dewan Komisaris memiliki Tata Tertib Dan Cara Menjalankan Pekerjaan Dewan Komisaris yang tertuang dalam SK Komisaris No.04 Tahun 2008 tgl. 07 April 2008.
- Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan / atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan / atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
- Seluruh Anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai
- Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepentingan dan hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan / atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan

dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen.

Penyelenggaraan Rapat.

- Rapat Dewan Komisaris

No	Tanggal	Materi
1	05 Jan 2009	THT, Surat Penghapusan Inventaris, Penghapusan Kredit Macet
2	13 Jan 2009	Persiapan RDL & RDD, Anggaran Dekom
3	14 Jan 2009	RKAT, KUD, Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, Usulan penghapusan inventaris & kredit
4	27 Jan 2009	Surat Asbanda, Laporan hasil audit, RKAT 2008, SK Management
5	02 Feb 2009	Evaluasi kinerja tahun 2008
6	16 Feb 2009	Rencana study banding (2 tim), RUPS, Lelang kendaraan, BPR Prisma dana, Kredit macet
7	19 Feb 2009	Persiapan study banding Tim 1 & Tim 2, Pemeriksaan SKAI semester II/2008, Pengalihan saham BPR Prisma Dana
8	02 Mar 2009	Laporan study banding Tim 1, Pemeriksaan Bank Indonesia, Hasil audit KAP
9	10 Mar 2009	Laporan study banding Tim 2
10	12 Mar 2009	Persiapan implementasi komite, Materi RDL, Materi RKDD
11	16 Mar 2009	Persiapan RUPS pertanggungjawaban tahun buku 2008, Rencana Bisnis & RKAT 2009, Study banding, Tata tertib, BPP Hapus Tagih & Hapus Buku, Asuransi Jabatan, Tambahan modal, Tindak lanjut temuan Bank Indonesia-BPK-PPATK-SKAI, PPMP & PPIP, Assesmen SDM. Lainnya : Masalah Pemimpin Cabang Jakarta, PKS dengan Bank Mega, Renovasi & Pembangunan Gedung Ktr Bank Sulut, Vonis PN Manado (pencairan SP2D Pemkab Minut-BS Airmadidi), Pembagian tugas & wewenang direksii, Tindakan terhadap pegawai yang terlibat kegiatan politik.
12	18 Mar 2009	Assesmen SDM & Pincab Jakarta, Renovasi & Pembangunan gedung Ktr Bank Sulut, Persiapan RUPS pertanggungjawaban tahun buku 2008, Rencana bisnis 2009-2012 & RKAT 2009, Paparan & Diskusi (hasil study banding, tata tertib direksi, BPP WO & HT, Asuransi Jabatan, Setoran modal, Tindak lanjut temuan-temuan, PPMP & PPIP. Lainnya : PKS Bank Sulut dengan Bank Mega, PKS dengan Menteri Koperasi, Vonis PN Manado (pencairan SP2D Pemkab Minut-BS Airmadidi), Pembagian tugas & wewenang Direksi
13	23 Mar 2009	Rapat RDL & RKDD, Laporan-laporan, Bahan persiapan RUPS
14	30 Mar 2009	Mukerwil Timur FKDKP-BPDSI di Ambon, Persiapan rapat koordinasi Dekom & Direksi
15	06 Apr 2009	Acara RUPS, Pengesahan RUPS, Proyeksi Modal
16	13 Apr 2009	Acara-Agenda-Panitia RUPS, Persiapan Rapat Koordinasi
17	14 Apr 2009	Bahan RUPS tahunan & RUPS Luar Biasa, Surat Direksi No. 192a/B/UMM-30 Maret 2009 ttg Anggaran Pembangunan Gedung Kantor Bank Sulut 2008 & 2009, Pembukaan loket/Kantor Kas Dipenda Sulut
18	17 Apr 2009	BSMR Level I & II, Bahan RUPS, Tata tertib direksi
19	22 Apr 2009	Evaluasi kinerja management
20	27 Apr 2009	Persiapan acara RUPS tahunan
21	04 Mei 2009	Acara RUPS (Laporan tahun buku 2008), BSMR Level I & II, Pemeriksaan Bank Indonesia Manado
22	11 Mei 2009	Penetapan RUPS, Laporan-laporan, Kredit sindikasi
23	04 Juni 2009	Audit KAP
24	08 Juni 2009	Direktur Utama (cuti tahunan, pengunduran diri, hak-hak), hearing DPRD Provinsi sulawesi Utara
25	15 Juni 2009	Penghapusan inventaris, Pemantauan profil risiko
26	23 Juni 2009	Persiapan RKDD, Persetujuan KAP, Acara sertijab
27	29 Juni 2009	Persiapan RDD & Masa jabatan
28	01 Juli 2009	Penjaringan calon Direktur Utama, Asuransi jabatan, Pegawai kontrak, Online System
29	06 Juli 2009	Persiapan RDD & Sertijab, Panjar umum lainnya, BPP Perkreditan
30	14 Juli 2009	Rencana RUPS, KUD, Masalah menonjol, dll
30	21 Juli 2009	Persiapan bahan rapat/diskusi Dekom & Komite utk tgl. 27 Juli 2009
31	27 Juli 2009	Rakor & ekspos rencana RDL & RKDD
32	03 Ags 2009	Kinerja manajemen
33	10 Ags 2009	Persiapan rapat Dekom & Komite utk tgl 25 Agustus 2009
34	18 Ags 2009	Hasil pemeriksaan Bank Indonesia, BPP Penerapan Program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme
35	24 Ags 2009	Rakor Dekom & Komite, Lainnya : KPK, SPBS, PKS
36	31 Ags 2009	Penyelesaian tindak lanjut temuan Bank Indonesia, materi RUPS, KPK, SPBS, Evaluasi PKS

37	01 Sep 2009	Penyelesaian tindak lanjut temuan Bank Indonesia, Persiapan RUPS-LB, Somasi terhadap Cabang Jakarta
38	03 Sep 2009	Persiapan bahan rakor Dekom & Komite tgl 7-9 September 2009
39	07 Sep 2009	Penghargaan mantan Dirut, Pembangunan gedung baru Cabang Airmadidi
40	14 Sep 2009	Persiapan pertemuan/Diskusi Dekom-Direksi-Pimdiv-Komite (pelaksanaan pengawasan aktif)
41	25 Sep 2009	Rencana jadwal RUPS, Kebijakan Umum Direksi
42	08 Okt 2009	Tindak lanjut temuan Bank Indonesia, pelaksanaan PBI yang baru dan PSAK 50/55
43	12 Okt 2009	Sanksi pelanggaran pengisian data laporan SID
44	19 Okt 2009	Laporan sewa gedung Samrat, Materi RUPS-LB, Lain-lain masalah yang sedang menonjol
45	21 Okt 2009	Surat Bank Indonesia No. 11/141/GBI/DPIP/Rahasia tgl 20 Oktober 2009 perihal Keputusan atas pencalonan pengurus PT Bank Sulut, Kebijakan Umum Direksi, Bank Fokus dan Bank Devisa
46	29 Okt 2009	Iklan PT Bank Sulut, Lainnya : Insentif Komite, SK Mutasi
47	02 Nov 2009	Laporan pemeriksaan khusus Cabang Limboto
	09 Nov 2009	Persiapan RDD, masalah menonjol, Bangunan Gedung BS
48	11 Nov 2009	Kebijakan Umum Direksi, Bank Fokus & Bank Devisa
49	16 Nov 2009	Pantauan Profil Risiko Triwulan III/2009
50	23 Nov 2009	Bahan/ Materi RDD, Lain-lain : Masalah yang menonjol
51	30 Nov 2009	Kebijakan Umum Direksi 2010.
52	17 Des 2009	Surat Kopkar tentang biaya sewa kendaraan, Pemberian kredit kepada Pemkot Gorontalo, PKS penjaminan kontra garansi bank dengan asuransi Videi, Surat Bank Indonesia No. 11/54-11/53, Renovasi di Kantor Perwakilan Jakarta
53	22 Des 2009	Penghapusbukuan kredit macet
54	28 Des 2009	Surat-surat penting yang harus diselesaikan direksi dan dilaporkan ke Dekom diakhir tahun 2009

Dewan Komisaris mengadakan rapat menyangkut kebijakan Bank secara berkala sesuai kebutuhan dengan melakukan koordinasi antar anggota Dewan Komisaris. Disamping itu melakukan rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membicarakan perkembangan Bank.

Selama tahun 2009, untuk rapat formal dan rapat koordinasi dilakukan 16 kali antara Dewan Komisaris dengan Direksi. Disamping itu juga menghadiri rapat eksternal (Bank Indonesia), Badan Pemeriksa Keuangan, Forum Komunikasi Dewan Komisaris BPD-SI dan lain-lain).

Dewan Komisaris secara periodik juga menghadiri rapat evaluasi kinerja Triwulan yang dihadiri oleh seluruh Pemimpin Cabang, Pemimpin Kelompok dan Pemimpin Divisi.

Para anggota Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup dalam melaksanakan tugasnya.

- **Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi.**

No.	Bulan	MATERI
1	14 Jan 2009	Kebijakan Umum Direksi, Laporan SCW, Penghapusan Inventaris & Kredit Ekstra, Tindak lanjut RUPS, Tantiem
2	18 Mar 2009	Assesmen & Pemimpin Cabang Jakarta, Pembangunan gedung Bank Sulut, RUPS tahun buku 2008, Rencana Bisnis 2009-2012
3	30 Mar 2009	RUPS, Pembagian laba, Anggaran dasar Bank Sulut, Materi RUPS, Evaluasi Rencana Bisnis & RKAT, Permasalahan Cabang Jakarta
4	22 Apr 2009	Persiapan acara RUPS, Materi RUPS
5	05 Juni 2009	Direktur Utama (Cuti, Sertijab, Hak Dirut), Hearing DPRD Sulut, Transisi direksi . Lainnya : Anggaran dasar bank Sulut, Gedung Bank Sulut, Permasalahan Cabang Jakarta
6	23 Juni 2009	KAP, Sertijab, IT, THT, Pelayanan Nasabah, Tindak lanjut RUPS 27 Mei 2009, Obligasi IV, Agenda RUPS-LB Agustus 2009
7	29 Juni 2009	PKS Asuransi Jabatan dengan Asuransi Jiwasraya, SK Direksi ttg Peraturan Penerimaan & Pengangkatan Pegawai Baru, Pengisian jabatan Pemimpin Cabang Jakarta
8	01 Juli 2009	Asuransi Jabatan, Online System, Pengaturan Direksi
9	03 Ags 2009	Tindak lanjut temuan Bank Indonesia, Kebijakan strategis, Persiapan RUPS yang akan datang.

		Lainnya : CSR, Uang makan komite, Kendaraan dinas Dekom, Lelang kendaraan dinas
10	01 Sep 2009	Tindak lanjut hasil RUPS-LB 03 Agustus 2009, Gedung Bank Sulut, IT, Sewa mobil Kopkar, THT, Lelang kendaraan, Temuan Bank Indonesia, Penalty dari Bank Indonesia, Penerimaan pegawai, System It kredit, Bank Sulut Club, Persiapan RUPS-LB
11	14 Sep 2009	Tindak lanjut pemeriksaan pembangunan gedung Bank Sulut, Asuransi jabatan
12	08 Okt 2009	Perjanjian Kerjasama sewa gedung kantor oleh PT. Wings Air
13	13 Okt 2009	Persiapan RUPS-LB, Evaluasi tindak lanjut masalah menonjol lainnya seperti : PKS Sewa gedung Bank Sulut, Penghargaan mantar Dirut, Penilaian Bank Indonesia, Iklan Bank Sulut, Bank Devisa, Acara di Jakarta
14	11 Nov 2009	Kebijakan umum Direksi 2010 & Rencana Bisnis Bank 2010-2012
15	23 Nov 2009	Masalah menonjol (Gedung Bank Sulut, Somasi Cabang Jakarta, Tindak lanjut temuan SKAI di Cabang Limboto, Tindak lanjut sanksi/denda Bank Indonesia, SOP, Iklan/Media Massa, PHK Pegawai Kontrak, Lelang umum 2 mobil Bank Sulut.

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Anggota Direksi

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Februari 2008 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 04 Nopember 2008 susunan Direksi Bank Sulut adalah:

Nama	Jabatan	Domisili	Mulai	Berakhir
Xaverius Mapandy	Direktur Utama	Manado	28/02/2008	27/02/2012
Jeffry J. Wurangian	Direktur Pemasaran	Manado	28/02/2008	27/02/2012
Bobby Makasutji	Direktur Umum	Manado	04/11/2008	03/11/2012
Ridwan Nggilu	Direktur Kepatuhan	Manado	04/11/2008	03/11/2012

Susunan Direksi tersebut telah dicatat dalam administrasi Bank Indonesia melalui Surat Bank Indonesia Nomor 10/3/DPIP/Prz/Rahasia tanggal 04 Desember 2008

Selama tahun 2009 susunan keanggotaan Direksi Bank Sulut telah terjadi 2 (dua) kali perubahan sbb :

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 27 Mei 2009 susunan keanggotaan Direksi menjadi sbb :

Nama	Jabatan	Domisili	Mulai	Berakhir
Jeffry J. Wurangian	Direktur Pemasaran	Manado	28/02/2008	27/02/2012
Bobby Makasutji	Direktur Umum	Manado	04/11/2008	03/11/2012
Ridwan Nggilu	Direktur Kepatuhan	Manado	04/11/2008	03/11/2012

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Oktober 2009 dengan susunan Direksi menjadi sbb :

Nama	Jabatan	Domisili	Mulai	Berakhir
Jeffry J. Wurangian	Direktur Utama	Manado	23/10/2009	27/02/2012
Ridwan Nggilu	Direktur Pemasaran	Manado	23/10/2009	27/02/2012
Bobby Makasutji	Direktur Umum	Manado	04/11/2008	03/11/2012

Kedudukan Jeffry J. Wurangian sebagai Direktur Utama dan Ridwan Nggilu sebagai Direktur Pemasaran sampai 31 Desember 2009 belum efektif karena belum memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

Komposisi Direksi tersebut diatas telah memenuhi ketentuan :

- Seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus dan persyaratan kesehatan fisik serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku sebagaimana Akta Pendirian Bank dan keputusan RUPS maupun keputusan Komisaris
- Jumlah Anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
- Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
- Seluruh Direksi Bank memiliki kompetensi dan integritas sesuai penilaian Bank Indonesia dan telah lulus *Fit & Proper Test* dari Bank Indonesia
- Direksi Bank tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit
- Direktur Utama Bank berasal dari pihak independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, sesama anggota Direksi, antara anggota Direksi dan anggota Komisaris tidak terdapat hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun kesamping
- Direksi Bank tidak ada yang merangkap jabatan sebagai Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan dan atau lembaga keuangan lain
- Anggota Direksi Bank tidak menjadi pengurus Partai Politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan.

Tugas dan Tanggung Jawab De.wan Direksi

- Direksi memiliki Peraturan Tata Tertib dan Tata Cara menjalankan tugas/pekerjaan Direksi yang tertuang dalam SK Komisaris No.02 Tahun 2009 tanggal 30 April 2009.
- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi sudah menyediakan waktu yang cukup untuk mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana di atur dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi telah berkomitmen untuk mengembangkan melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sesuai ketentuan Bank Indonesia.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan audit intern Bank, audit eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan hasil/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada dewan Komisaris.
- Direksi melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholder. Kondisi non keuangan dimaksud antara lain kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank, strategi dan manajemen serta laporan manajemen.

- Direksi telah memantau serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar Tingkat Kesehatan Bank dapat dipenuhi.
- Direksi telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan pada *home page* Bank Sulut setiap bulan.

Penyelenggaraan Rapat.

Rapat Direksi

Rapat Direksi menyangkut kebijakan dan operasional Bank Sulut secara berkala dilakukan sesuai kebutuhan dengan melakukan koordinasi antar anggota Direksi. Berikut jumlah Rapat Direksi dengan rincian pembahasan materi sbb :

No	Tanggal	Materi
1	06 Jan 2009	Membahas dan menyiapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan sehubungan dengan ekspos negatif dalam pemberitaan surat kabar harian Komentar dan Posko
2	13 Jan 2009	Evaluasi kesiapan penyusunan rencana bisnis bank dan RKAT tahun 2009
3	15 Jan 2009	Rapat sekaligus presentasi kepada Pefindo dalam rangka pemeringkatan Obligasi III
4	22 Jan 2009	Rencana Bisnis Bank dan RKAT 2009
5	28 Jan 2009	Mutasi terbatas untuk mengisi kekosongan pada tingkat Divisi dan kaitannya dengan kantor cabang tertentu
6	04 Feb 2009	Persiapan menghadapi pelaksanaan penarikan undian Simpeda nasional
7	30 Mrt 2009	Pembahasan materi RUPS Luar Biasa, Evaluasi kesiapan panitia lokal dalam rangka penarikan undian tabungan Simpeda nasional
8	30 Apr 2009	Membahas penundaan RUPS tahunan untuk tahun buku 2008 dan RUPS Luar Biasa
9	05 Mei 2009	Evaluasi kinerja April 2009
10	16 Jun 2009	Draft perubahan ketentuan penerimaan pegawai
11	23 Jun 2009	Penunjukkan KAP (Kantor Akuntan Publik) dalam rangka kegiatan audit untuk laporan posisi Juni s/d. Desember 2009
12	29 Jun 2009	Menindaklanjuti hasil RUPS tgl 27 Mei 2009
13	30 Jun 2009	Draft perubahan ketentuan penerimaan pegawai
14	01 Jul 2009	Membahas persiapan serah terima Direktur Utama
15	06 Jul 2009	Tindak lanjut surat kuasa Dewan Komisaris tentang penunjukkan koordinator Direksi
16	16 Jul 2009	Program asuransi jabatan bagi pengurus dan penyelesaian perjanjian kerjasama mengenai pengelolaan ex Dana THT
17	27 Jul 2009	Tindak lanjut exit meeting dengan Bank Indonesia
18	04 Ags 2009	Rencana usulan kenaikan gaji dan tunjangan pegawai
19	18 Ags 2009	Langkah-langkah menghadapi permasalahan dengan nasabah atas nama Dirga Korompis yang terjadi di Cabang Jakarta
20	10 Sep 2009	Membahas kewenangan dan tanggungjawab Koordinator Direksi, langkah penyelesaian masalah (somasi) nasabah tabungan Cabang Jakarta (an. Dirga Korompis), persiapan Rapat Kerja Evaluasi Triwulan III/2009
21	14 Sep 2009	Membahas kriteria penilaian Branch Contest
22	29 Sep 2009	Membahas materi RUPS Luar Biasa
23	02 Okt 2009	Persiapan materi dan pelaksanaan RUPS tgl 23 Oktober 2009, penyelesaian somasi nasabah cabang Jakarta, penilaian kembali atas pembangunan 4 gedung kantor dan usulan kenaikan gaji pegawai tetap dan pegawai kontrak
24	29 Okt 2009	Tindak lanjut hasil RUPS Luar Biasa tgl 23 Oktober 2009 dan persiapan penyusunan Kebijakan Umum Direksi dan Rencana Bisnis tahun 2010
25	11 Nov 2009	Persiapan penyusunan Kebijakan Umum Direksi dan Rencana Bisnis Bank
26	04 Des 2009	Penyelesaian status pegawai kontrak

Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris.

Selama tahun 2009, untuk rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris dilakukan 15 (lima belas) kali dengan perincian sbb :

No.	Bulan	Materi
1	14 Jan 2009	Kebijakan Umum Dfireksi, Laporan SCW, Penghapusan Inventaris & Kredit Ekstra, Tindak lanjut RUPS, Tantiem
2	18 Mar 2009	Assesmen & Pemimpin Cabang Jakarta, Pembangunan gedung Bank Sulut, RUPS tahun buku 2008, Rencana Bisnis 2009-2012
3	30 Mar 2009	RUPS, Pem, bagian laba, Anggaran dasar Bank Sulut, Materi RUPS, Evaluasi Rencana Bisnis & RKAT, Permasalahan Cabang Jakarta
4	22 Apr 2009	Persiapan acara RUPS, Materi RUPS
5	05 Juni 2009	Direktur Utama (Cuti, Sertijab, Hak Dirut), Hearing DPRD Sulut, Transisi direksi . Lainnya : Anggaran dasar bank Sulut, Gedung Bank Sulut, Permasalahan Cabang Jakarta
6	23 Juni 2009	KAP, Sertijab, IT, THT, Pelayanan Nasabah, Tindak lanjut RUPS 27 Mei 2009, Obligasi IV, Agenda RUPS-LB Agustus 2009
7	29 Juni 2009	PKS Asuransi Jabatan dengan Asuransi Jiwasraya, SK Direksi ttg Peraturan Penerimaan & Pengangkatan Pegawai Baru, Pengisian jabatan Pemimpin Cabang Jakarta
8	01 Juli 2009	Asuransi Jabatan, Online System, Pengaturan Direksi
9	03 Ags 2009	Tindak lanjut temuan Bank Indonesia, Kebijakan strategis, Persiapan RUPS yang akan datang. Lainnya : CSR, Uang makan komite, Kendaraan dinas Dekom, Lelang kendaraan dinas
10	01 Sep 2009	Tindak lanjut hasil RUPS-LB 03 Agustus 2009, Gedung Bank Sulut, IT, Sewa mobil Kopkar, THT, Lelang kendaraan, Temuan Bank Indonesia, Penalty dari Bank Indonesia, Penerimaan pegawai, System It kredit, Bank Sulut Club, Persiapan RUPS-LB
11	14 Sep 2009	Tindak lanjut pemeriksaan pembangunan gedung Bank Sulut, Asuransi jabatan
12	08 Okt 2009	Perjanjian Kerjasama sewa gedung kantor oleh PT. Wings Air
13	13 Okt 2009	Persiapan RUPS-LB, Evaluasi tindak lanjut masalah menonjol lainnya seperti : PKS Sewa gedung Bank Sulut, Penghargaan mantar Dirut, Penilaian Bank Indonesia, Iklan Bank Sulut, Bank Devisa, Acara di Jakarta
14	11 Nov 2009	Kebijakan umum Direksi 2010 & Rencana Bisnis Bank 2010-2012
15	23 Nov 2009	Masalah menonjol (Gedung Bank Sulut, Somasi Cabang Jakarta, Tindak lanjut temuan SKAI di Cabang Limboto, Tindak lanjut sanksi/denda Bank Indonesia, SOP, Iklan/Media Massa, PHK Pegawai Kontrak, Lelangf umum 2 mobil Bank Sulut.

Rapat Direksi bersama Pejabat Eksekutif.

Selama tahun 2009, untuk rapat formal dalam kaitan implementasi kebijakan dalam operasional Bank Sulut, Direksi melakukan rapat kerja umum setiap 3 (tiga) bulan sekali. Khusus dengan para pejabat eksekutif dilakukan 38 (tiga puluh delapan) kali dengan perinciannya sbb :

No	Tanggal	Materi
1	12 Jan 2009	Rapat dengan Divisi MRK membahas issue yang sedang berkembang
2	29 Jan 2009	Pengecekan terakhir terhadap Rencana Bisnis Bank dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk tahun 2009
3	09 Feb 2009	Draft struktur organisasi baru
4	13 Feb 2009	Membahas permintaan data oleh Kantor Akuntan Publik dalam rangka penyelesaian hasil audit tahun buku 2008
5	18 Feb 2009	Evaluasi tugas pekerjaan yang tertunda, BPP Kewenangan, Review BPP KYC
6	23 Feb 2009	Laporan hasil pemantauan Profil Risiko
7	16 Mrt 2009	BPP Kewenangan, BPP KYC, Laporan hasil pengujuan oleh Divisi MRK
8	18 Mrt 2009	Pengarahan Direksi
9	31 Mrt 2009	Revisi BPP KYC
10	13 Apr 2009	Rencana penyediaan kredit Merah Putih, Grand Kawanua, Pengadaan mobil bank keliling, money changer, HUT Bank Sulut, mutasi jabatan
11	20 Apr 2009	Rapat ALCO
12	21 Apr 2009	Peningkatan kualitas terhadap kajian Divisi MRK
13	14 Mei 2009	Rapat dengan Komite Teknologi Informasi membahas rencana pengadaan aplikasi Manajemen Risiko dilanjutkan dengan Rapat Komite Manajemen Risiko
14	04 Jun 2009	Pelaksanaan kewenangan Direktur Utama sesuai keputusan RUPS tgl 27 Mei 2007, dilanjutkan dengan membahas pelaksanaan RKAT 2009
15	15 Jun 2009	Membahas perkembangan kinerja dan pelaksanaan RKAT 2009

16	22 Jun 2009	Strategi dan action plan pencapaian RKAT 2009, permasalahan ke-SDM-an lainnya
17	09 Jul 2009	Persiapan emisi Obligasi IV
18	29 Jul 2009	Tindak lanjut hasil audit teknologi informasi oleh auditor Auditindo
19	05 Ags 2009	Surat-surat yang diteruskan kepada Divisi MRK dan tindaklanjutnya
20	07 Ags 2009	Pengarahan Direksi setelah pelaksanaan upacara mutasi
21	19 Ags 2009	Evaluasi pelaksanaan pembangunan gedung kantor cabang Airmadidi yang mengalami keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan
22	26 Ags 2009	Program pensiun berkaitan dengan kepesertaan dan PHDP
23	27 Ags 2009	Persiapan pelaksanaan lelang pengadaan lembaga penjamin emisi Obligasi IV
24	31 Ags 2009	Rapat ALCO membahas penyesuaian suku bunga simpanan
25	16 Sep 2009	Draft Perjanjian Kerja Bersama antara Direksi dengan Serikat Pekerja
26	30 Sep 2009	Membahas penawaran Wings Air untuk menyewa gedung kantor Bank Sulut, rencana pelaksanaan pengadaan lembaga penjamin Obligasi IV
27	01 Okt 2009	Penyusunan action plan penerapan BPP Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
28	14 Okt 2009	Kesiapa materi pelaksanaan RUPS Luar Biasa tgl. 23 Oktober 2009
29	19 Okt 2009	Pemantapan materi pelaksanaan RUPS Luar Biasa tgl. 23 Oktober 2009
30	20 Okt 2009	Rencana pengadaan jasa Lembaga Profesi/Penunjang Emisi Obligasi IV
31	02 Nov 2009	Rapat dengan Komite Teknologi Informasi
32	03 Nov 2009	Penyempurnaan Buku Pedoman Perusahaan tentang Kewenangan
33	09 Nov 2009	Finalisasi penyusunan BPP Kewenangan
34	12 Nov 2009	Rapat dengan para pemimpin Divisi tentang pencapaian akhir tahun
35	02 Des 2009	Rencana Bisnis Bank 2010-2012, membahas pertemuan dengan PT IAY tentang produk Pro View ATM
36	22 Des 2009	Kinerja dan proyeksi akhir tahun 2009
37	28 Des 2009	Evaluasi perkembangan capaian kinerja akhir tahun
38	29 Des 2009	Membahas Rencana Bisnis Bank 2010-2012 dengan mempertimbangkan kinerja sampai dengan akhir Desember 2009

3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE DIBAWAH KOMISARIS

Sesuai PBI No.8/4/PBI//2006 yang disempurnakan dengan PBI No 8/14/PBI/2006, dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap manajemen, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite yang anggotanya dipilih dan diangkat berdasar integritas, independensi, kompetensi dan pengalaman kerja.

a). Komite Audit.

Jumlah anggota Komite Audit sebanyak 3 (tiga) orang dengan komposisi kanggotaan Komite Audit pada akhir tahun 2009 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota Komite Audit dari pihak independen, dengan susunan sebagai berikut:

- 1). Drs. John Rumondor : Ketua (Komisaris Independen)
- 2). Jan F. Mangindaan, SE : Anggota
- 3). Arnold Laoh, SH. LLM. Phd : Anggota

Komite Audit diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Kriteria umum untuk diangkat menjadi Komite Audit adalah memiliki integritas, independensi dan kompetensi.

Seluruh anggota Komite Audit bersifat independen, baik terhadap Direksi, Auditor Ekstern maupun Auditor Intern/Satuan kerja Audit Intern (SKAI).

Tugas, Wewenang dan tanggung jawab

Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi serta memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris terhadap hal-hal berikut ini ;

No	Tanggal	Materi
1	12 Jan 2009	Tindak lanjut hasil audit Bank Indonesia 2008, SKAI, KAP dan PPAK
2	22 Jan 2009	Evaluasi tindak lanjut hasil audit Bank Indonesia, BPK RI, Kantor Akuntan Publik (Management Letter), PPAK, dan SKAI
3	12 Feb 2009	Evaluasi Kinerja Tahun 2008
4	18 Feb 2009	Pemeriksaan SKAI Semester II tahun 2008
5	25 Feb 2009	Hasil audit SKAI pada Divisi Umum
6	18 Mar 2009	Tata cara penghapusan kredit macet
7	27 Apr 2009	Biaya penagihan kredit bermasalah
8	15 Mei 2009	Evaluasi kinerja Maret 2009
9	04 Juni 2009	Audit KAP tahun buku 2009
10	15 Juni 2009	Penghapusan inventaris
11	01 Juli 2009	Panjar umum lainnya
12	06 Juli 2009	Penyesuaian BPP Perkreditan Khusus hapus buku & hapus tagih
13	14 Juli 2009	Premi asuransi jabatan
14	19 Ags 2009	Hasil pemeriksaan Bank Indonesia
15	07 Okt 2009	Tindak lanjut temuan Bank Indonesia
16	08 Okt 2009	Pelaksanaan peraturan Bank Indonesia yang baru dan PSAK 50-55
17	20 Okt 2009	Biaya Iklan
18	02 Nov 2009	Pemeriksaan khusus kredit Cabang Limboto
19	10 Nov 2009	Kegiatan bank umum Devisa
20	30 Des 2009	Usulan direksi atas hapus buku tahun 2009

Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai Akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Laporan Program Kerja dan Realisasi

Fokus kerja Komite Audit tahun 2009 meliputi kegiatan antara lain:

- 1 Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit
2. Pemantauan atas tindak lanjut hasil audit
3. Evaluasi realisasi RKAT dan laporan pengawasan rencana bisnis

Berdasarkan tugas dan fokus kegiatan tersebut diatas, selama tahun 2009 Komite Audit telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktifitas penting yang dilakukan oleh Bank dengan program kerja sebagai berikut:

No	Tahun 2009	Pokok Pembahasan
1	Triwulan I	Tindak lanjut hasil audit 2008 Bank Indonesia, SKAI, KAP & PPAK ; Evaluasi kinerja 2008
2	Triwulan II	Evaluasi kinerja Triwulan I 2009, Audit KAP Tahun 2009, Penghapusan inventaris
3	Triwulan III	BPP Hapus Buku, Panjar umum lainnya
4	Triwulan IV	Tindak lanjut temuan Bank Indonesia, Audit Khusus, Pelaksanaan PBI baru dan PSAK 50-55

Frekuensi rapat Komite Audit dalam tahun 2009 sebanyak 38 kali meliputi rapat internal sebanyak 20 kali, rapat dengan Dewan komisaris 18 kali dan seluruhnya telah didokumentasikan dalam notulen rapat. Untuk tingkat kehadiran dalam 1 tahun sesuai dengan hari kerja dalam tahun 2009, karena telah diatur suatu aturan internal kehadiran semua anggota 5 hari kerja dalam seminggu.

b). Komite Pemantau Risiko

Jumlah anggota Komite Pemantau Risiko sebanyak 3 (tiga) orang dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2009 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak Independen, dengan susunan sebagai berikut:

1. Drs. John Rumondor : Ketua (Komisaris Independen)
2. Adolf Mangundap, SH : Anggota
3. Hengky H.M. Palit, SE : Anggota

Komite Pemantau Risiko diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Kriteria umum untuk diangkat menjadi Komite Pemantau Risiko adalah memiliki integritas, independensi dan kompetensi.

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap eksekutif (Direksi beserta jajarannya) dalam area penerapan Manajemen Risiko agar dapat terlaksana secara efektif, baik mengenai isu-isu manajemen risiko dan sistem pengawasan internal serta langkah-langkah antisipatif yang diambil Direksi dalam pengelolaan risiko dan perbaikan kebijakan manajemen risiko, Komite Pemantau Risiko antara lain melakukan:

1. Pemantauan dan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan;

Selain itu, Komite Pemantau Risiko juga membantu Dewan Komisaris dalam meningkatkan kualitas Pelaksanaan Tata Kelola yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Untuk memperkuat kondisi internal serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, antara lain meliputi rekomendasi terhadap hal-hal sebagai berikut:

No	Tanggal	Materi
1	16 Jan 2009	Draft SK Direksi ttg Pembatasan Penggunaan Fasilitas Direksi
2	22 Jan 2009	Pemantauan atas Profil Risiko bulan Desember 2008 Antisipasi Penarikan Dividen oleh Pemegang Saham
3	17 Feb 2009	Sanksi atas pengisian data laporan SID Desember 2007
4	19 Feb 2009	Pengalihan saham perseroan di BPR Prisma Dana
5	18 Mar 2009	Tata cara penghapusan kredit macet

6	07 Apr 2009	Tindak lanjut hasil pemeriksaan umum tahun 2008 oleh Bank Indonesia
7	11 Mei 2009	Kredit Sindikasi
8	12 Juni 2009	Pemantauan Profil Risiko
9	18 Ags 2009	BPP Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (BPP APU-PPT)
10	06 Okt 2009	Permohonan persetujuan Sewa Gedung Kantor Bank Sulut oleh Wings Air
11	07 Okt 2009	Sanksi pelanggaran pengisian data laporan SID Desember 2007
12	10 Nov 2009	Program Bank Sulut menjadi Bank Devisa
13	16 Nov 2009	Pantauan Profil Risiko Triwulan III tahun 2009

Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugasnya berdasarkan Buku Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Pemantau Risiko berkoordinasi dengan unit kerja terkait dan Komite Audit.

Laporan program Kerja dan Realisasi

Fokus kerja Komite Pemantau tahun 2009 meliputi kegiatan antara lain;

1. Pemantauan Potensi Risiko;
2. Pemantauan Strategi Usaha dan
3. Peningkatan Kualitas Manajemen Risiko.

Selain itu, aktivitas lain terkait dengan fokus kerja Komite Pemantauan Risiko yaitu antara lain:

No	Bulan	Pokok Pembahasan
1	Triwulan I	Saham perseroan pada BPR Prisma Dana dan antisipasi penarikan dividen oleh pemegang saham
2	Triwulan II	Kepatuhan bank terhadap komitmen bank dan kredit sindikasi
3	Triwulan III	Kajian terhadap penerapan APU-PPT
4	Triwulan IV	Kajian langkah strategis menjadi Bank Devisa

Rapat Komite

Frekuensi rapat resmi dan kehadirannya dalam tahun 2009 sebanyak 31 kali meliputi rapat internal 13 kali, rapat koordinasi dengan Komite Audit 18 kali sedangkan rapat dengan Dewan Komisaris 18 kali dan telah didokumentasikan dalam notulen rapat, sementara koordinasi dan kehadirannya sesuai dengan hari kerja dalam tahun 2009, dan karena telah diatur dalam suatu aturan internal bahwa semua anggota 5 hari kerja dalam seminggu.

c). Komite Remunerasi dan Nominasi

Komposisi keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi pada akhir tahun 2009 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota dan 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai anggota dan 1 (satu) orang anggota diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Kriteria umum untuk diangkat menjadi Komite Remunerasi dan Nominasi adalah memiliki integritas, independensi dan kompetensi.

Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut :

1. Arsjad Daud, SH : Ketua (Komisaris Independen)
2. Jantje Monalu, SE : Anggota (Komisaris Independen)

3. Ir. Esthyani Danakusuma : Anggota (Pemimpin Divisi SDM)

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Terkait dengan kebijakan remunerasi, melakukan evaluasi kebijakan remunerasi serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

Terkait dengan kebijakan nominasi, menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota dewan Komisaris dan Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, memberikan rekomendasi mengenai calon anggota dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Memberikan rekomendasi mengenai calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

Laporan Program Kerja dan Realisasi

Fokus Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2009 meliputi kegiatan antara lain:

1. Review terhadap proses dan kewajaran remunerasi Bank; dan
2. Review terhadap prosedur nominasi.

Berdasarkan tugas dan kegiatan tersebut, selama tahun 2009 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan pembahasan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktifitas penting yang dilakukan oleh Bank dengan program kerja sebagai berikut:

No	Bulan	Agenda Kegiatan Rapat
1	Triwulan I	Evaluasi Pencapaian Tahun 2008
2	Triwulan II	Evaluasi Triwulan I 2009
3	Triwulan III	Evaluasi Triwulan II 2009, Kenaikan Gaji Pokok
4	Triwulan IV	Evaluasi Triwulan III 2009, Kenaikan Uang Makan

Rapat Komite

Frekuensi dalam tahun 2009, 18 kali yang telah didokumentasikan dalam notulen rapat. Untuk tingkat kehadiran dalam 1 tahun sesuai dengan hari kerja dalam tahun 2009, karena telah diatur dalam suatu aturan internal kehadiran semua anggota 5 hari kerja dalam Seminggu. Adapun perincian rapat yang dilakukan adalah sbb:

No	Tanggal	Materi
1	13 Jan 2009	Rencana Kerja KRN
2	28 Jan 2009	Tugas KRN
3	10 Jun 2009	Skill Assesment untuk Pemimpin Divisi
4	18 Jun 2009	Penjaringan Direktur Utama
5	25 Jun 2009	Nominasi calon Direktur Utama
6	26 Okt 2009	Nominasi calon Direktur Kepatuhan
7	16 Nov 2009	Rekomendasi Jeffry J. Wurangian sebagai Direktur Utama dan Ridwan Nggilu sebagai Direktur Pemasaran

4. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Penanganan benturan kepentingan pada Bank Sulut diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) sesuai Surat Peraturan Direksi No.02/PBS-MRK/DIR/VI/2008. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusannya.

Benturan kepentingan dimaksud antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomi Bank dengan kepentingan ekonomi pribadi pemilik, anggota Komisaris, anggota Direksi maupun Pejabat Eksekutif Bank dan atau pihak terkait dengan Bank, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu diluar prosedur dan ketentuan yang berlaku. Apabila keputusan tetap harus diambil maka harus mengutamakan kepentingan ekonomi Bank dan menghindarkan kerugian atau berkurangnya keuntungan Bank.

Sepanjang tahun 2009 tidak terdapat transaksi dan kegiatan aktifitas operasional yang mengandung benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

5. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

a). Fungsi Kepatuhan

Sepanjang tahun 2009 Bank telah berupaya menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, standar-standar kepatuhan lainnya yang telah ditetapkan secara internal, ketentuan Mengenai Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), serta pemenuhan komitmen yang disepakati kepada pihak internal maupun eksternal.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan selama tahun 2009 telah dilaksanakan sesuai PBI No.1/PBI/1999 tentang SPFAIB, Pedoman Pelaksanaan Tata Kerja Direktur Kepatuhan dan Pedoman Umum Tata Kerja Direktur Kepatuhan. Dalam melaksanakan tugas Direktur Kepatuhan berusaha mencegah Direksi Bank, Pimpinan kantor Cabang agar tidak menempuh kebijakan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dengan melakukan kajian atas setiap kebijakan maupun Surat Keputusan yang ada.

Walaupun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, menyangkut kelemahan dan disiplin karyawan maupun sistem kontrol atas implementasi peraturan yang berlaku, dengan demikian perbaikan yang berkesinambungan tetap terus dilakukan agar penerapan praktik-praktik prinsip GCG dan praktik kepatuhan benar benar melekat dalam kegiatan kerja sehari-hari.

Dalam penerapan fungsi kepatuhan terutama mengenai pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang, maka Direktur Kepatuhan setiap bulannya melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, sedangkan setiap 6 (enam) bulan melaporkan kepada Bank Indonesia yang isinya antara lain memuat komitmen dengan otoritas yang berwenang dan monitoring permasalahan yang belum terselesaikan.

Beberapa kepatuhan terhadap ketentuan posisi per 31 Desember 2009

1. Rasio Kecukupan Modal (CAR). Pencapaian kecukupan permodalan Bank Sulut mencapai sebesar 14.42% dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar, melebihi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh BI yaitu 8%.
2. Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah adalah 5.09%
3. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Tidak ada pinjaman kepada pihak terkait baik perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan BMPK
4. Rasio Kredit Bermasalah (NPL). Rasio NPL adalah 0.51%

b). Fungsi Audit Internal

Fungsi ini dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dengan misi mendukung terlaksannya proses manajemen risiko, internal control dan tata kelola perusahaan yang memadai. pelaksanaan audit menggunakan metode risk based yang memprioritaskan pada unit kerja yang memiliki inherent risk yang lebih besar, menggunakan metode pemeriksaan secara on-site dan pemantauan secara off-site dan Auditee telah memberikan komitmen untuk melakukan perbaikan dengan batas waktu tertentu atas temuan hasil audit.

Secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian intern telah menunjukkan hasil cukup memadai. Bank terus berupaya agar sistem pengendalian intern dijalankan secara efektif dan efisien, dan prosedur pengawasan dilaksanakan tanpa pengecualian, serta mempertahankan lingkungan yang menunjang dalam upaya pengendalian intern. Kasus-kasus penyimpangan yang terjadi selama tahun 2009 umumnya timbul karena kurang memadainya fungsi pengawasan melekat dari pejabat pada unit kerja operasional, serta kurangnya pemahaman terhadap pentingnya konsistensi dalam mengimplementasikan prinsip kepatuhan pada sistem prosedur.

Guna lebih meningkatkan kompetensi serta obyektivitas hasil audit, Unit SKAI mengikutkan auditornya pada program pelatihan baik ekstern maupun intern, seminar/workshop serta mempersiapkan auditor-auditor untuk mengikuti program sertifikasi profesi berkelanjutan auditor internal.

c). Fungsi Audit Eksternal

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan bank, bank telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Bank Indonesia. Penunjukan dilakukan oleh RUPS sesuai rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris, sesuai keputusan RUPS Luar Biasa sebagaimana yang tercantum dalam Akta Notaris M.S.E Pangemanan, SH Nomor : 128 tanggal 24 Nopember 2008 RUPS menyetujui pelimpahan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik untuk pelaksanaan audit tahun buku 2009 sampai dengan tahun 2011. Selama tahun 2009 Kantor Akuntan Publik tersebut hanya memberikan jasa audit dan tidak memberikan jasa lain kepada Bank Sulut, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan proses audit.

6. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR .

Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dan besar (*large exposure*) selama tahun 2009 tidak terdapat adanya pelampauan. Secara bulanan Divisi Kredit membuat laporan BMPK yang ditujukan kepada Dewan Komisaris, Direksi maupun para Divisi terkait.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar kepada debitur / group per posisi 31 Desember 2009 sebagaimana tabel dibawah ini:

No	Penyediaan dana	Jumlah	
		Debitur	Rp.
1	Kepada pihak terkait	27	4.919.346.455
2	Kepada Debitur inti (individu group)	39.488	2.203.817.775.146

7. RENCANA STRATEJIK BANK.

a). Rencana Jangka Panjang (*corporate plan*)

Bank Sulut sejak tahun 2007 telah menyusun Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*) 2007 – 2011 berdasarkan misi dan visi yaitu rencana strategis jangka panjang dalam mencapai tujuan Bank yang rencana dan perubahannya disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.

Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*) ini telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Pemegang Saham melalui RUPS dan telah dilaporkan ke Bank Indonesia.

b). Rencana Jangka Menengah dan Pendek (*business plan*)

Rencana kegiatan Bank jangka menengah dan jangka pendek atau rencana bisnis Bank disusun setiap tahun yang dituangkan dalam RKAT 2009 dan Business Plan 2009 – 2011 yang memuat strategi kualitatif dan kuantitatif untuk memperbaiki kinerja usaha yang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

Rencana kegiatan Bank jangka menengah dan jangka pendek terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan kemudian telah disampaikan ke Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK YANG

BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA.

a). Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Perseroan.

Adalah kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Bank Sulut atau Bank lain atau lembaga Keuangan Bukan Bank atau perusahaan lain dengan komposisi sebesar atau lebih dari 5% dari modal terseter.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang termasuk dalam ketentuan tersebut tidak memiliki Saham sesuai ketentuan transparansi dimaksud.

b). Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Diantara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, masing-masing tidak memiliki hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat kedua baik vertikal maupun horisontal.

c). Remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris, yang diterima pada tahun 2009

No.	Keterangan	Direksi 3 orang	Dewan komisaris 4 orang
1	Remunerassi	Rp. 4.518.155.168	Rp. 4.526.655.260
2	Fasilitas lain		
	Jumlah	*) Rp. 4.518.155.168	*) Rp. 4.526.655.260

*)dinilai dalam ekuivalen jutaan rupiah

d). Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam tahun 2009 yang dikelompokan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut:

Jumlah remunerasi per orang dalam tahun 2009	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris
Diatas Rp.2 Milyar	-	-
Diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp.2 Milyar	3	3
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp.1 Milyar	-	1
Rp. 500 juta kebawah.	-	-

e). Ratio Gaji Tertinggi dan Terendah

Perincian ratio gaji tertinggi dan terendah tahun 2009, dalam skala perbandingan berikut:

- a). Ratio gaji pegawai tertinggi : terendah = Rp. 17.010.400 : Rp. 850.000
 b). Ratio gaji Direksi tertinggi : terendah = Rp. 50.000.000 : Rp. 45.000.000
 c). Ratio gaji Komisaris tertinggi : terendah = Rp. 37.500.000 : Rp. 33.750.000

d). Ratio gaji Direksi tertinggi : pegawai tertinggi= Rp. 50.000.000 : Rp. 17.010.400

f). Penyimpangan internal (*internal fraud*)

<i>Internal Fraud</i>	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Total fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses internal	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-

g). Permasalahan hukum tahun 2009

Permasalahan hukum	jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (mempunyai kekuatan hukum yang tepat)	- No. 03/PPdt.G/2009/PN.TIm	-
Dalam proses penyelesaiannya	- No. 93/Pdt.G/2008/PN. Mdo - No. 203/Pdt-G/2009/PN-Mdo	-
Total	3	-

h). Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Selama tahun 2009 tidak terdapat kegiatan investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi, restrukturisasi, hutang/modal dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan atau sifat transaksi dengan pihak afiliasi.

i). *Buy Back Shares* dan *Buy Back Obligasi Bank*.

Selang tahun 2009 tidak pernah melakukan *buy back* terhadap obligasi yang diterbitkan

j). Agenda Kegiatan Sosial dan Lingkungan tahun 2009

No	Bulan	Agenda Kegiatan	Besar Dana
1	Triwualn I	- Bantuan saran ibadah di Kelurahan Batu Putih - Bantuan bencana alam di Tahuna - Bantuan kemitraan untuk kelompok tani jagung di Desa Kasuratan dan Tampusu	Rp. 27.500.000 Rp. 30.000.000 Rp. 112.500.000

		<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan motor sampah utk Kota Tomohon - Bantuan bencana alam di Talaud - Hibah motor utk operasional Polres Bitung - Bantuan kemitraan utk kelompok Tani Rica/Cabai desa Warembungan - Bantuan motor sampah utk Kab. Pohuwato - Bantuan motor sampah utk Kab. Tahuna 	Rp. 44.127.500 Rp. 30.000.000 Rp. 17.437.090 Rp. 120.000.000 Rp. 47.965.500 Rp. 48.230.500
2	Triwualn II		Rp. -
3	Triwualn III	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan masing-masing 2 (dua) unit komputer utk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur - Fee jasa pendampingan kemitraan utk Desa Tampusu dan Kasuratan - Bantuan Tong Sampah utk Kab. Minahasa Tenggara - Bantuan hibah bahan bangunan utk masyarakat ekonomi lemah di Kab. Boalemo - Bantuan utk Pegawai teladan Sulawesi Utara - Uang muka Truck ArmRoll - Bantuan utk fakir miskin di Kab. Boalemo - Bantuan utk fakir miskin di Kab. Limboto - Bantuan motor sampah utk Kab. Boalemo 	Rp. 20.240.000 Rp. 3.325.000 Rp. 28.500.000 Rp. 25.000.000 Rp. 29.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 12.000.000 Rp. 18.950.000 Rp. 46.800.000
4	Tiwulan IV	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan utk bencana alam di Kab. Sitaro 	Rp. 15.000.000
		Total pengeluaran dana untuk kegiatan sosial & Lingkungan tahun 2008	Rp. 686.575.590

V. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PT. BANK SULUT

Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Mayoritas anggota Dewan Komisaris adalah Pihak Independen dan seluruh anggota Dewan Komisaris sudah lulus *Fit & Proper Test* dan mendapat persetujuan Bank Indonesia sehingga mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya transparan serta dapat berjalan efektif dan efisien sesuai prinsip-prinsip GCG.

Kompetensi, integritas, komposisi, dan jumlah anggota Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Direksi mampu bertindak serta mengambil keputusan secara independen. Tugas dan tanggung jawab Direksi berjalan efektif dan efisien sesuai prinsip-prinsip GCG.

Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank sehingga pelaksanaan tugas maupun penyelenggaraan rapat Komite-komite dapat berjalan efektif dan efisien. Rekomendasi Komite-komite bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.

Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan yang apabila terjadi benturan kepentingan, anggota Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan mengutamakan kepentingan ekonomi Bank serta mengungkapkannya dalam setiap keputusan, dilengkapi risalah rapat, diadministrasikan, didokumentasikan.

Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan baik dan efektif. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan satuan kerja operasional. Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi telah tersedia dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

SKAI selaku unit yang menjalankan fungsi audit intern Bank dapat menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif sesuai pedoman intern dan standard minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB. Dalam hal terdapat kelemahan minor telah / dapat di atasi dengan tindakan rutin.

Pelaksanaan audit oleh Akuntan, Publik efektif, independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan serta sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan dengan kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik.

Manajemen efektif dan aktif dalam mengidentifikasi, mengendalikan risiko Bank, Kebijakan, Prosedur, Penetapan limit serta sistem informasi manajemen yang komprehensif sehingga terpelihara kondisi internal Bank yang sehat. Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang di hadapi Bank.

Manajemen efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank sehat, ketentuan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur intern Bank. Penerapan pengendalian intern dilakukan dengan tindakan korektif sehingga tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi bank.

Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis untuk penyediaan dana kepada pihak terkait maupun penyediaan dana besar. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen. Tidak ada pelanggaran BMPK maupun prinsip kehati-hatian. Diversifikasi penyediaan dana merata atau

jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan.

Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan kepada publik media surat kabar maupun melalui *home page*. Informasi keuangan dan non-keuangan dapat tersedia tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.

Produk dan jasa Bank diinformasikan transparan dengan menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah secara efektif, termasuk memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.

Laporan pelaksanaan GCG disampaikan kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem informasi Manajemen Bank yang terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

Rencana Bisnis Bank (*business plan*) disusun realistis sesuai visi dan misi Bank maupun Rencana Korporasi (*corporate plan*) Bank dengan memperhatikan faktor eksternal, prinsip kehati-hatian termasuk asas perbankan yang sehat pelaksanaannya selalu dalam pengawasan Komisaris.

Sesuai dengan hasil *self assessment*, pelaksanaan GCG Bank Sulut periode Desember 2009 memperoleh nilai komposit 2,225 dengan predikat Baik.

VI. PENUTUP

Demikianlah laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Sulut tahun 2009 dibuat dengan beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan sehingga pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Sulut dapat berjalan baik dalam setiap aktifitas operasional Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Harapan ini didasari oleh kenyataan serta adanya dukungan dari Pemegang Saham, Komisaris dan seluruh jajaran yang ada di Bank Sulut serta kepercayaan masyarakat pengguna jasa keuangan.

Manado, 12 Mei 2010

DEWAN KOMISARIS

Robby Mamujaja
Komisaris Utama

M. Arsjad Daud
Komisaris

John Rumondor
Komisaris

Jantje Monalu
Komisaris

DEWAN DIREKSI

Jeffry Wurangian
Direktur Utama

Ridwan Nggilu
Direktur

Jefferson Lungkang
Direktur

RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT
SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
BANK SULUT PERIODE DESEMBER 2009

NO	ASPEK YANG DINILAI	BOBOT (a)	BOBOT (b)	NILAI (a)x(b)	CATATAN*)
1	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	10.00%	2	0.200	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip GCG
2	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	20.00%	2	0.200	Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.
3	KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	10.00%	2	0.200	Pelaksanaan tugas komite berjalan efektif dan rekomendasi Komite-Komite bermanfaat dan dapat digunakan acuan Keputusan Dewan Komisaris
4	PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	10.00%	3	0.300	Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank
5	PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	5.00%	3	0.150	Pelaksanaan tugas dan Independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan cukup efektif
6	PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	5.00%	2	0.100	SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif
7	PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	5.00%	2	0.100	Penerapan Akuntan Publik dilakukan secara independen
8	PENERAPAN MANEJEMEN RESIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	7.50%	3	0.225	Manajemen cukup efektif memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank prosedur dan penerapan pengendalian intern sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank
9	PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT	7.50%	2	0.150	Bank memiliki kebijakan, sistem, prosedur tertulis

	(RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)				untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
10	TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPERATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL	15.00%	2	0.300	Bank transparansi menyampaikan informasi keuangan kepada publik, terkait pelaporan internal Bank menyediakan data dan informasi dengan efektif untuk pengambilan keputusan, termasuk cakupan laporan GCG yang lengkap
11	RENCANA STRATEGIES BANK	5.00%	2	0.100	Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank disusun realistis sesuai Visi dan Misi Bank, telah memperhatikan seluruh faktor eksternal/internal, prinsip kehati hatian dan azas perbankan yang sehat
	Nilai Komposit	100.00 %		2.225	BAIK

KRITERIA :

NILAI KOMPOSIT	PREDIKAT KOMPOSIT
Nilai Komposit <1.5	Sangat Baik
1.5 ≤ Nilai Komposit < 2.5	Baik
2.5 < Nilai Komposit < 3.5	Cukup Baik
3.5 ≤ Nilai Komposit < 4.5	Kurang Baik
4.5 ≤ Nilai Komposit < 5	Tidak Baik